

Pengaruh Karakter Eksekutif dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Sharma Aidha Afriyanti ¹⁾, Sugiarti ²⁾, & Widi Hariyanti ³⁾

Universitas Setia Budi

ARTICLES INFORMATION



Journal of Islamic Finance
and Accounting

Vol. 2 No. 1
Januari - Mei 2019
Hlm.: 1-13

Department of Sharia
Accounting, Faculty of
Islamic Economics and
Business, IAIN Surakarta

Keywords:

*Tax Avoidance, Executive
Character, Independent
Commissioner, Audit
Committee, Audit Quality*

JEL Classification code:
C12, C22, H26, L60

Abstract

The purpose of the study is to analyze the influence of executive character and corporate governance dimensions on tax avoidance in manufacturing companies that listed on the Indonesia Stock Exchange Period 2012–2016. The samples of this study is 30 companies that selected by using purposive sampling method. The results of this study shows that: Executive characters positive effect on tax avoidance. Independent commissioners not effect on tax avoidance. The audit committee not effect on tax avoidance. Audit quality positive effect on tax avoidance.

PENDAHULUAN

Pajak sebagai sumber penerimaan negara yang sangat besar yang diperoleh dari Wajib Pajak dan Badan dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung, bersifat memaksa dan dipungut berdasarkan Undang-undang. Menurut Kurniasih & Sari (2013) pajak merupakan hal yang menjadi perhatian penting karena beban pajak akan mengurangi laba bersih dan sudah menjadi rahasia umum perusahaan menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin. Oleh karena itu, perusahaan melakukan upaya efisiensi pembayaran pajak dengan meminimalkan beban pajak dalam batas yang tidak melanggar aturan melalui aktivitas penghindaran pajak. Salah satu penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak adalah *tax avoidance*, yaitu upaya penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan wajib pajak dengan cara berusaha mengurangi jumlah pajak terutang dengan mencari kelemahan peraturan (*loopholes*) (Dewi dan Jati, 2014).

Fenomena penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia dimuat di berita online (www.cnnindonesia.com) pada tanggal 28 Maret 2016 oleh Elisa Valenta Sari, menginformasikan bahwa

Corresponding author:

¹⁾ sharmaafriyanti@gmail.com

Dirjen Pajak membongkar cara yang dilakukan oleh 2.000 perusahaan multinasional atau perusahaan asing yang teridentifikasi terhadap penghindaran pajak. Dalam melakukan penghindaran pajak terdapat beberapa cara seperti menggunakan *transfer pricing* yang merupakan transaksi barang atau jasa pada suatu kelompok usaha dengan menaikkan (*mark up*) atau menurunkan harga (*mark down*) yang banyak dilakukan oleh perusahaan global (*Multi-National Enterprise*). Selain *transfer pricing*, fasilitas fiskal juga dimanfaatkan oleh perusahaan asing seperti *tax allowance* yaitu pengurangan pajak untuk menghindari pembayaran pajak. Setelah mendapatkan fasilitas *tax allowance*, beberapa perusahaan asing tersebut melakukan perubahan nama untuk bisa memperoleh dan mendaftarkan perusahaan lagi sebagai penerima fasilitas *tax allowance*. Dari beberapa cara penghindaran pajak tersebut, negara dirugikan triliunan rupiah.

Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan-perusahaan tersebut tentu saja melalui kebijakan yang diambil oleh pemimpin perusahaan itu sendiri. Dimana pimpinan perusahaan sebagai pengambil keputusan dan kebijakan dalam perusahaan tentu memiliki karakter yang berbeda-beda (Dewi dan Jati, 2014). Seorang pemimpin perusahaan bisa saja memiliki karakter *risk taker* atau *risk averse* yang tercermin dari besar kecilnya risiko perusahaan (Budiman dan Setiyono, 2012; Dewi dan Jati, 2014). Semakin tinggi risiko suatu perusahaan, maka eksekutif cenderung bersifat *risk taker*. Sebaliknya, semakin rendah risiko suatu perusahaan, maka eksekutif cenderung bersifat *risk averse* (Dewi dan Jati, 2014).

Dyreng *et al.* (2010) melakukan penelitian untuk menguji pengaruh individu *Top Executive* (karakter eksekutif) terhadap penghindaran pajak perusahaan. Dengan mengambil sampel 908 pimpinan perusahaan yang tercatat di *ExecuComp* yang dimana 908 pimpinan tersebut terdiri dari 351 CEO, 195 CFO dan 362 eksekutif lainnya. Dari penelitian tersebut Dyreng *et al.* (2010), memperoleh hasil bahwa pimpinan perusahaan (*executive*) secara signifikan berpengaruh positif terhadap tingkat penghindaran pajak. Begitupula dengan penelitian yang dilakukan oleh Swingly & Sukartha (2015) yang menyatakan bahwa karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan hasil yang diperoleh dari penelitian Budiman dan Setiyono (2012), Carolina, Maria Natalia, dan Debbianita (2014) dan Dewi & Jati (2014) terkait pengaruh karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak yang menyatakan bahwa karakter eksekutif berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Selain karakter eksekutif yang memiliki keterkaitan dengan penghindaran pajak, aturan struktur tata kelola perusahaan juga mempengaruhi cara perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Tata kelola perusahaan yang baik muncul karena adanya pemisahan antara kepemilikan dengan pengelola perusahaan yang dapat menimbulkan *agency problem*. Dalam penelitian ini, dimensi tata kelola perusahaan diprosikan dengan komisaris independen, komite audit dan kualitas audit. Penelitian yang dilakukan oleh Subagiastra, I Putu Edy Arizona dan I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra (2016) dan Sari (2015) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2014), Maharani & Suardana (2014), serta Sari & Suardana (2016) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Selain komisaris independen, komite audit merupakan komite yang beranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang. Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris sehingga komite audit bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Penelitian yang dilakukan oleh tan (2011) dan Tandean (2015) yang menemukan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan Diantari dan Ulupui (2016), Dewi & Jati (2014), Maharani & Suardana (2014), dan Sari & Suardana (2016) menemukan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

Selanjutnya dimensi tata kelola perusahaan yang berhubungan dengan penghindaran pajak adalah kualitas audit. Laporan keuangan yang diaudit oleh auditor KAP *The Big Four*

menurut beberapa referensi lebih berkualitas sehingga menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya, oleh karena itu perusahaan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* (Pricewaterhouse Cooper–PwC, Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, Ernst & Young–E&Y) memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit KAP *Non The Big Four* (Annisa & Kurniasih, 2012). Penelitian yang dilakukan Maharani & Suardana (2014) dan Fadhilah (2014) yang menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan Annisa dan Kurniasih (2012) menyimpulkan bahwa kualitas audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Begitupula dengan Dewi & Jati (2014) yang menemukan hasil bahwa kualitas audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Karakter Eksekutif dan Penghindaran Pajak

Keputusan seorang eksekutif dalam sebuah perusahaan akan berbeda dengan keputusan eksekutif perusahaan lainnya. Karakter atau perilaku pimpinan perusahaan dapat berupa mengambil resiko, menghindari resiko atau bersikap netral. Karakter eksekutif perusahaan dalam hal pengambilan resiko dapat terlihat dari resiko yang dihadapi perusahaan (Novita, 2016).

Eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* tidak ragu-ragu untuk melakukan pembiayaan hutang (Lewellen 2006). Dengan adanya pembiayaan dari hutang, maka perusahaan akan terbebani dengan beban bunga dari hutang perusahaan. Eksekutif yang memiliki level resiko tinggi akan cenderung meningkatkan resiko penghindaran pajak perusahaan.

Penelitian Saputra, Rifa dan Rahmawati (2016) menunjukkan hasil bahwa karakter eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Demikian juga dengan hasil penelitian Prastiwi dan Ratnasari (2019), dan Singly dan Sukartha (2015). Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis pertama dari penelitian ini adalah:

H_1 : Karakter eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Komisaris Independen dan Penghindaran Pajak

Komisaris independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan dewan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan terkait dengan perusahaan pemilik menurut peraturan yang dikeluarkan oleh BEI, jumlah komisaris independen proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang tidak berperan sebagai pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya tiga puluh persen (30%) dari seluruh anggota komisaris, disamping hal itu komisaris independen memahami undang-undang dan peraturan tentang pasar modal serta diusulkan oleh pemegang saham yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) (Pohan 2009).

Penghindaran pajak pada perusahaan dapat diminimalisir dengan adanya fungsi pengawasan yang baik dari dewan komisaris. Adanya dewan komisaris independen akan meminimalisir tindakan penghindaran pajak. Penelitian Sari (2014), Maharani & Suardana (2014), serta Sari & Suardana (2016) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis kedua dari penelitian ini adalah:

H_2 : Komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Komite Audit dan Penghindaran Pajak

Komite audit adalah sekumpulan orang yang dipilih dari anggota dewan komisaris yang bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan dan pengungkapan (disclosure) (Winata, 2014). Komite audit memiliki peran penting sebagai salah satu organ perusahaan yang mutlak harus ada dalam penerapan CG.

Penelitian Pohan (2008) menyatakan bahwa apabila jumlah komite audit pada suatu perusahaan tidak sesuai peraturan yang dikeluarkan BEI, maka akan berakibat pada tindakan manajemen dalam melakukan minimalisasi laba untuk kepentingan pajak. Artinya bahwa dengan adanya komite audit dapat meminimalisasi tindakan penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Diantari dan Ulupui (2016), Dewi & Jati (2014), Maharani & Suardana (2014), dan Sari & Suardana (2016) menemukan bahwa komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah:

H_3 : Komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kualitas Audit dan Penghindaran Pajak

Kualitas audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi, dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan (Maharani dan Suardana 2014). Laporan keuangan yang diaudit oleh KAP Big Four dianggap memiliki kualitas lebih baik dibandingkan dengan laporan keuangan yang diaudit oleh KAP Non Big Four.

Kualitas audit yang baik dapat mengurangi praktek penghindaran pajak perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Maharani & Suardana (2014) dan Fadhillah (2014) yang menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis keempat penelitian ini adalah:

H_4 : Kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif yang berbentuk kausalitas. Obyek dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016, sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 144 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016. Teknik pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *purposive sampling*.

Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar berturut-turut di Bursa Efek Indonesia dari periode 2012-2016
2. Menerbitkan annual report selama periode pengamatan
3. Tidak mengalami kerugian selama periode 2012-2016
4. Mempunyai data-data penelitian yang diperlukan

Dari kriteria pengambilan sampel tersebut, maka di dapat sampel penelitian ini adalah 30 perusahaan dengan periode pengamatan selama 5 tahun sehingga di dapat 150 data pengamatan.

Variabel penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak (Y), karakter eksekutif (X_1), komisaris independen (X_2), komite audit (X_3), dan kualitas audit (X_4). Penghindaran pajak diukur dengan proksi *Cash Effective Tax Rate* (CETR).

Definisi Operasional variable

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak yaitu merupakan usaha pengurangan bahkan meniadakan hutang pajak yang harus dibayar perusahaan dengan cara legal atau tidak melanggar undang-undang yang ada dengan memanfaatkan kelemahan peraturan perpajakan di suatu Negara. Seperti penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya, variabel ini juga diproksikan dengan menggunakan rumus *Cash Effective Tax Rate* (CETR). CETR dihitung dengan menggunakan cara membagi total kas yang dibayarkan untuk beban pajak perusahaan dengan laba sebelum pajak penghasilan.

Karakter Eksekutif

Karakter Eksekutif dalam penelitian ini di proksikan dengan resiko perusahaan. Untuk mengukur resiko perusahaan ini dihitung melalui deviasi standar dari EBITDA (*Earning Before Income Tax, Depreciation, and Amortization*) dibagi dengan total asset perusahaan.

Komisaris independen

Proksi komisaris independen dalam penelitian ini diukur dengan proporsi komisaris independen dimana jumlah anggota komisaris independen dibagi dengan jumlah seluruh anggota dewan komisaris.

Komite audit

Pengukuran komite audit dalam penelitian ini dengan menghitung jumlah komite audit. Kualitas audit diukur menggunakan variabel *dummy*, bernilai 1 jika diaudit oleh KAP *The Big Four* dan bernilai 0 jika diaudit oleh KAP *Non The Big Four*.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan menggunakan SPSS. Model regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

Adapun langkah-langkah teknik analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: $CETR = \alpha + \beta_1 RISK + \beta_2 Kom_In + \beta_3 KoA + \beta_4 KuA + \varepsilon$

Statistik Deskriptif

Deskripsi secara statistic dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat nilai tertinggi, terendah, rata-rata dan standar deviasi dari masing-masing variable. Data-data tersebut nantinya kan digunakan untuk pembahasan

Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan analisis regresi berganda maka data dalam penelitian harus lolos dalam pengujian asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, heteroskedastisitas, multikolinieritas dan autokorelasi. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji Kologorov-Smirnov, uji heteroskedastisitas menggunakan scatterplot regresi, uji multikolinieritas dengan melihat nilai tolerance dan Variance in Factor (VIF) sedangkan autokorelasi dengan menggunakan uji Durbin Watson.

Uji Ketepatan Model

Uji ketepatan model dalam penelitian ini dengan melihat nilai koefisien determinasi dan nilai signifikansi F. jika nilai signifikansi pada uji F di bawah 0,05 maka model dinyatakan fit atau layak.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji t dengan melihat nilai signifikansi pada uji t, apabila nilai signifikansinya di bawah 0,05 maka hipotesis penelitian diterima (Ghazali, 2011)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan dengan *purposive sampling*, yaitu metode pemilihan sampel dengan kriteria tertentu. Berdasarkan kriteria tersebut, maka perusahaan yang memenuhi kriteria adalah 30 perusahaan manufaktur. Pada penelitian ini dilakukan analisa statistik deskriptif yang digunakan untuk memberikan gambaran nilai maksimum, minimum, rata-rata (*mean*), dan simpangan baku (standar deviasi) dari variabel-variabel yang diteliti. Hasil analisa deskriptif dapat dilihat di tabel 1 berikut ini:

Tabel 1
Hasil Analisa Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
CETR	150	0,0354	0,5503	0,2694	0,0866
RISK	150	0,0007	0,0879	0,0275	0,0175
Kom_In	150	0,2500	0,5000	0,3753	0,0647
KoA	150	3,0000	4,0000	3,1467	0,3549
KuA	150	0,0000	1,0000	0,6133	0,4886

Sumber: Data sekunder yang telah diolah

Berdasarkan Tabel 1, CETR memiliki nilai minimum sebesar 0,0354, nilai maximum sebesar 0,5503, dan sedangkan untuk nilai rata rata (*mean*) sebesar 0,2694 dengan standar deviasi sebesar 0,0866. Pengukuran nilai CETR berkisar lebih dari 0 dan kurang dari 1. Rata-rata nilai CETR sebesar 0,2694 yang berarti nilai tersebut berada lebih dari 0 dan kurang dari 1. Sehingga rata-rata dari perusahaan manufaktur melakukan penghindaran pajak.

Besarnya nilai minimum *risk* yang menjadi sampel dalam penelitian adalah 0,0007, nilai maximum sebesar 0,0879, dengan nilai rata-rata sebesar 0,0275 dan nilai standar deviasi sebesar 0,0175. Rata-rata nilai *risk* sebesar 0,0275 menunjukkan bahwa risiko perusahaan yang rendah atau kecil sehingga karakter eksekutif bersifat *risk averse*. Dimana eksekutif yang memiliki sifat *risk averse* cenderung tidak menyukai risiko sehingga kurang berani dalam mengambil keputusan bisnis.

Besarnya nilai minimum presentase komisaris independen sebanyak 25%, nilai maximum sebanyak 50%, nilai rata-rata sebanyak 37,53% dan standar deviasi sebesar 6,5%. Nilai rata-rata presentasi komisaris independen sebesar 37,53% menunjukkan bahwa jumlah komisaris independen rata-rata di dalam perusahaan telah sesuai dengan peraturan POJK yang ditetapkan yaitu sebesar 30% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris.

Besarnya nilai minimum jumlah komite audit sebanyak 3 orang, nilai maximum sebanyak 4 orang, nilai rata-rata sebesar 3,1467 dan standar deviasi sebesar 0,3549. Nilai rata-rata komite audit sebesar 3,1467 menunjukkan bahwa rata-rata di dalam perusahaan jumlah komite audit lebih dari 3 orang sehingga kebijakan terhadap penghindaran semakin rendah.

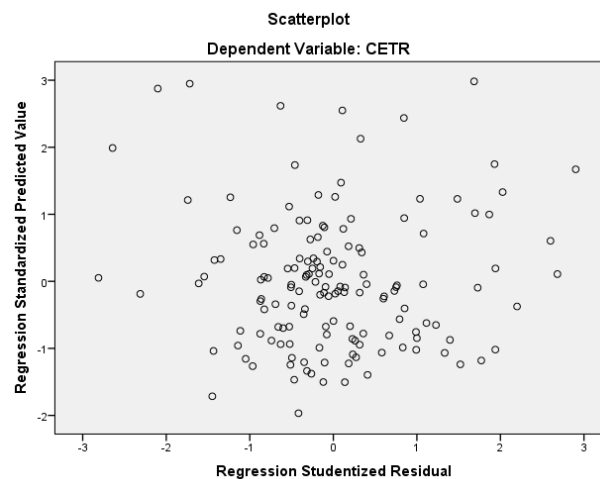
Nilai minimum dari kualitas audit adalah sebesar 0,0000, nilai maximum sebesar 1,0000, nilai rata-rata sebesar 0,6133 dan nilai standar deviasi sebesar 0,4886. Nilai rata-rata sebesar 0,6133 menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan manufaktur memiliki audit yang berkualitas dengan auditor dari KAP *The Big Four*.

Selain analisa statistik deskriptif, penelitian ini juga menggunakan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Hasil uji asumsi klasik dapat dilihat pada tabel 2 dan gambar 1 berikut ini:

Tabel 2
Hasil Uji Asumsi Klasik

	Uji Normalitas	Uji Multikolinieritas	Uji Autokorelasi
	Sig.	Tolerance	VIF
<i>Unstandardized residual</i>	0,081		
RISK		0,912	1,096
Kom_In		0,977	1,023
KoA		0,916	1,092
KuA		0,856	1,168
<i>Durbin-Watson</i>			1,619

Sedangkan untuk hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 1.
Hasil uji heteroskedastisitas

Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan pengujian *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*. Hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) menunjukkan bahwa data terdistribusi secara normal. Hal ini dapat dilihat dari tingkat signifikansi sebesar 0,081 dan nilainya diatas $\alpha = 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual telah terdistribusi secara normal.

Uji multikolinieritas yang digunakan adalah dengan melihat nilai VIF (*variance-inflating factor*) dan *Tolerance*, model regresi dinyatakan terbebas dari multikolinieritas jika nilai *Tolerance* > 0,10 dan nilai VIF <10. Hasil penelitian ini juga menggambarkan asumsi multikolinieritas terpenuhi, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen dalam penelitian ini terbebas dari multikolinieritas.

Hasil Uji Heteroskedastisitas menggunakan uji *scatterplot* regresi. Dari hasil uji scatterplot tersebut dapat dilihat bahwa terdapat pola yang tidak beraturan di dalam diagram tersebut, namun menyebar disepanjang garis 0 (nol). Maka berdasarkan aturan *scatterplot* model regresi data tidak mengalami heteroskedastisitas.

Uji autokorelasi yang digunakan adalah *durbin-watson*. Berdasarkan Tabel 2 diatas, dapat dilihat bahwa nilai *Durbin-Watson* adalah 1,619 yang berarti terletak di antara -2 sampai +2, sehingga dapat diartikan bahwa pada model regresi yang dibentuk tidak terdeteksi

adanya autokorelasi. Sementara itu, hasil analisa regresi berganda yang telah dilakukan, dapat dilihat dalam tabel 3 berikut ini:

Tabel 3.
Hasil Uji Hipotesis dengan Regresi Linier Berganda

	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
(Constant)	0,302	0,077
RISK	1,077	0,413
Kom_In	0,009	0,108
KoA	-0,034	0,020
KuA	0,039	0,015

Sumber : Data sekunder yang telah diolah

Dari tabel tersebut, diperoleh persamaan model regresi linier sebagai berikut:

$$\text{Cash ETR} = 0,302 + 1,077 \text{ RISK}_{it} + 0,009 \text{ Kom_In}_{it} - 0,034 \text{ KoA}_{it} + 0,039 \text{ KuA}_{it} + e$$

Setelah dilakukan uji analisis regresi berganda, selanjutnya adalah uji kelayakan model yang meliputi koefisien determinasi (R^2), uji F, dan uji t. Berikut adalah hasil uji kelayakan model yang disajikan dalam tabel 4:

Tabel 4
Hasil Uji Kelayakan Model

Uji Koefisien Determinasi (R^2)		
R Square	0,071	
Adjusted R Square	0,046	
Uji Signifikansi Model (Uji F Statistik)		
Nilai F	2,971	
Sig.	0,029	
Uji Parsial (Uji t)		
	t	Sig.
RISK	2,608	0,010
Kom_In	0,082	0,935
KoA	-1,674	0,096
KuA	2,515	0,013
<i>Dependent Var: Penghindaran Pajak</i>		

Sumber : Data sekunder yang telah diolah

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi ($Adj. R^2$) sebesar 0,046. Besaran nilai tersebut menunjukkan bahwa RISK, komisaris independen, komite audit dan kualitas audit menjelaskan sebesar 4,6% variasi (perubahan naik turunnya) terhadap penghindaran pajak. Sedangkan sisanya sebesar 95,4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terakomodasi dalam penelitian ini. Pada penelitian ini, uji signifikansi model regresi dilakukan dengan *ANOVA* atau uji F (*overall test*). Dari tabel diatas menunjukkan bahwa uji signifikansi model memiliki F_{hitung} sebesar 2,971 dengan probabilitas signifikansi 0,029. Karena $0,029 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel RISK, komisaris independen, komite audit dan kualitas audit secara bersama-sama mempengaruhi variabel penghindaran pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini adalah layak. Uji t digunakan

untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah karakter eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai signifikan dari variabel karakter eksekutif yang diprosikan menggunakan *risk* menunjukkan nilai sebesar 0,010 ($0,010 < 0,05$) dengan nilai koefisien β bernilai positif sebesar 1,077, maka H_1 ditolak dan H_0 diterima berarti variabel karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Dimana setiap kenaikan satu satuan *risk* akan mengakibatkan kenaikan tingkat penghindaran pajak sebesar 1,077.

Naik turunnya *risk* mencerminkan kecenderungan karakter eksekutif. Tingkat *risk* yang lebih tinggi mengindikasikan karakter eksekutif lebih memiliki sifat *risk taker* dibandingkan tingkat *risk* yang rendah, atau sebaliknya yaitu tingkat *risk* yang lebih rendah mengindikasikan karakter eksekutif lebih memiliki sifat *risk averse* dibandingkan dengan tingkat *risk* yang lebih tinggi. Oleh karena itu, semakin eksekutif bersifat *risk taker* maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Dyreng *et al.* (2010) yang menguji bahwa pimpinan perusahaan secara individu memiliki peran yang signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak. Hal ini didukung oleh penelitian Swingly & Sukartha (2015), Maharani & Suardana (2014), Handayani, Aris dan Mujiyati (2014) yang menyatakan bahwa karakter eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak..

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai signifikan dari variabel komisaris independen menunjukkan nilai sebesar 0,935 ($0,935 > 0,05$), maka H_2 ditolak dan H_0 diterima berarti variabel komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dalam hal dewan komisaris terdiri dari lebih dari 2 (dua) orang anggota dewan komisaris, jumlah komisaris independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris.

Berdasarkan perhitungan statistik deskriptif, rata-rata presentase komisaris independen dalam penelitian ini adalah 37,54% yang menunjukkan bahwa perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian rata-rata telah memenuhi peraturan yang sudah ditetapkan. Dengan tidak berpengaruhnya komisaris independen mengindikasikan bahwa fungsi komisaris independen sebagai pengawas dan penyeimbang dalam pengambilan keputusan oleh dewan komisaris tidak memberikan dampak yang berarti terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Maka keberadaan komisaris independen ini tidak memiliki kaitan secara langsung dalam melakukan penghindaran pajak, karena terbatasnya pengawasan dan banyaknya pihak-pihak terafiliasi yang mendominasi sehingga mampu untuk mengendalikan komisaris independen.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Annisa & Kurniasih (2012) dan Pradipta dan Supriyadi (2015) yang menyatakan tidak ada pengaruh proporsi dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak. Hal ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadhilah (2014) yang menyatakan bahwa terdapat beberapa hal yang menjadi alasan mengapa besarnya proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Pertama, tidak semua anggota komisaris independen dapat menunjukkan independensinya sehingga fungsi pengawasan tidak berjalan dengan baik dan berdampak pada kurangnya pengawasan terhadap manajemen dalam melakukan penghindaran pajak. Kedua, kemampuan komisaris independen dalam memantau proses keterbukaan dan penyediaan informasi akan terbatas apabila pihak-pihak terafiliasi yang ada

di perusahaan lebih mendominasi dan dapat mengendalikan komisaris independen secara keseluruhan. Ketiga, komisaris independen kurang tanggap dalam memperhatikan ada atau tidaknya tindakan penghindaran pajak di perusahaan sehingga melalaikan kewajibannya kepada negara.

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai signifikan dari variabel komite audit menunjukkan nilai 0,096 ($0,096 > 0,05$), maka H_3 ditolak dan H_0 diterima berarti variabel komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan Sari (2014), Swingly & Sukartha (2015), Subagiastra dkk (2016) serta Kurniasih & Sari (2013) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015, komite audit dalam suatu perusahaan minimal memiliki 3 (tiga) orang anggota. Dengan tidak berpengaruhnya komite audit mengindikasikan bahwa kinerja komite audit dalam melakukan pengawasan serta mendorong tingkat integritas dan kredibilitas pelaporan keuangan belum optimal. Fungsi dari komite audit tidak akan berjalan optimal apabila tidak adanya dukungan dari semua elemen perusahaan.

Hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Nilai signifikan dari variabel kualitas audit menunjukkan nilai 0,013 ($0,013 < 0,05$), maka H_4 diterima dan H_0 ditolak berarti variabel kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan Sari (2016), Dewi & Jati (2014), Annisa dan Kurniasih (2012) beserta Annisa (2011) yang menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dimana kualitas audit yang tinggi dapat mengurangi praktik penghindaran pajak. Perusahaan yang diaudit oleh KAP besar terbukti tidak melakukan penghindaran pajak karena auditor yang termasuk dalam KAP *The Big Four* lebih kompeten dan profesional dibandingkan dengan auditor yang termasuk dalam KAP *Non The Big Four*, sehingga ia memiliki pengetahuan yang lebih banyak tentang cara mendeteksi dan memanipulasi laporan keuangan yang mungkin dilakukan oleh perusahaan (Asfiyati, 2012).

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka didapat kesimpulan sebagai berikut: Karakter Eksekutif berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016. Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016. Komite Audit Independen tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016. Kualitas Audit berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka untuk penelitian selanjutnya penelitian dapat dilakukan tidak hanya pada perusahaan manufaktur, sehingga hasilnya lebih dapat digeneralisir. Kemudian untuk perhitungan *tax avoidance* bisa menggunakan proxy lainnya selain CETR.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa & Kurniasih. 2012. Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi & Auditing*, Vol. 8, 95 - 189.
- Annisa, Nuralifmida Ayu. 2011. Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance (studi pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2008). *Skripsi*. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Asfiyati. 2012. Pengaruh Corporate Governance, Kepemilikan Keluarga dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Skripsi*
- Budiman, Judi dan Setiyono. 2012. Pengaruh Karakter Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Jurnal Universitas Islam Sultan Agung*.
- Carolina, Verani, Maria Natalia, dan Debbianita. 2014. Karakteristik Eksekutif Terhadap Tax Avoidance Dengan Leverage Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 18, No.3, 409-419.
- Dewi, Ni Nyoman K. dan I Ketut Jati. 2014. Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan dan Dimensi Tata kelola Perusahaan Yang Baik Pada Tax Avoidance di Bursa Efek Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 6.2:249-260. ISSN 2302 - 8556.
- Diantari, Putu R. dan IGK Agung Ulupui. 2016. Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol. 16.1. Juli (2016): 702-732.
- Dyreng, S., M. Hanlon, and E. Maydew. 2008. Long run corporate tax avoidance. *The Accounting Review* 83 1 : 61-82.
- Dyreng, Scott D., Michelle Hanlon, Edward L. Maydew. 2010. The Effect of Executives on Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review*, Vol. 85, Juni 2010, pp 1163-1189.
- Fadhilah, Rahmi. 2014. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bei 2009-2011). *Skripsi*. Universitas Negeri Padang.
- Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivivariate dengan Program SPSS. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Handayani, C. Dewi, M. A. Aris dan Mujiyati. 2015. Pengaruh Return On Asset, Karakter Eksekutif, dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Terhadap Tax Avoidance. *Syariah Paper Accounting FEB UMS*. ISSN 2460-0784.
- <http://www.apb-group.com/the-big-four/>
- <https://academic77.wordpress.com/2017/04/21/jenis-data-penelitian/>
- <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/2016032811524678119992/djpbongkar-motif-2000-perusahaan-yang-kemplang-pajak/>

- Idris. 2006. *Aplikasi SPSS Dalam Analisis Data Kuantitatif*. Padang: FE-UNP.
- Indarti dan Winoto, Akbar Hadi. 2015. Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance dan Karakter Eksekutif Terhadap Tax Avoidance. *Management Dynamics Conference*.
- Jensen, Michael C. dan Meckling, William H. 1976. Theory of The Firm: Manajerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3 (4).
- Kurniasih, Tommy dan Maria M. R. Sari. 2013. Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekoidrnomi*. 18 (1):58-66.
- Maharani, I Gusti Ayu Cahya dan Ketut Alit Suardana. 2014. Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas dan Karakteristik Eksekutif Pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 9:525-539.
- Novita, Nova. 2016. Executives Characters, Gender and Tax Avoidance: A Study on Manufacturing Companies in Indonesia. *Advances in Economics, Business and Management Research*, volume 15
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Putri, Aldila Mistika. 2016. Pengaruh Kepemilikan Keluarga, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Aggressiveness pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2012-2015. *Skripsi*. Universitas Airlangga. Surabaya.
- Saputra, Muhammad Fajri, Rifa, Dandes dan Rahmawati, Novia. 2015. Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas dan Karakter Eksekutif terhadap Tax Avoidance pada perusahaan yang terdaftar di BEI. *JAAI Volume 19 No. 1 Juni 2015*, 1-12
- Sari, Aisya Fitri Andika. 2015. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen, Kompetensi Komite Audit, dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei 2010-2013. Universitas Airlangga. Surabaya.
- Sari, Gusti, 2014. Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perushaaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Struktur Kepemilikan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 2 No. 7 Desember 2014.
- Sari, I. A. Trisna Yudi dan K. A. Suardana. 2016. Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Komite Audit, Preferensi Risiko Eksekutif dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.16.1. Juli (2016): 72-100.
- Sari, M. M. Ratna, dan Supadmi. 2016. Corporate Risk-Taking dan Tax Avoidance. ISSN 1978-6069 Vol.11, No. 1. 28 Februari 2016.

- Sari, Yoli Oktafiani. 2016. Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Skripsi*. Universitas Andalas.
- Silligan, H., dan M. Machfoedz. 2006. Mekanisme Corporate Governance, Kualitas Laba dan Nilai Perusahaan. *Simposium Nasional Akuntansi 9*. 24-25 Agustus 2006. Padang.
- Suandy, Erly. 2008. Perencanaan Pajak. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, Erly. 2011. Hukum Pajak. Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.
- Subagiastra, Komang, I Putu Edy Arizona dan I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra. 2016. Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol. 1, No. 2, Hal: 167-193.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta, cv.
- Suharyadi & Purwanto. 2016. Statistika Edisi 3 Buku 2. Yogyakarta. Salemba Empat.
- Swingly, C. dan I.M. Sukartha. 2015. Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, dan Ukuran Perusahaan, Leverage dan Sales Growth pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 10 (1): 47-62.
- Tandean, Vivi Adeyani. 2015. Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers Unisbank (Sendi_U)*.
- Winata, Fenny. 2014. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013. *Tax & Accounting Review*, Vol. 4, No. 1, 2014.
- Zimmerman, J.L & R. L. Watts. 1983. Taxes and Firm Size. *Journal of Accounting and Economics*, 5:119-149.